

TANGGAPAN DAN PENDAPAT CAMAT SAMBENG
NOMOR : 411.6/761/410.333/2000

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA, DESA KRETE
RANGGON KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TA. 1999/2000

Setelah mempelajari isi dari laporan Pertanggung jawaban Saudara Kepala Desa Kreteranggan Kecamatan Sambeng terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan tahun anggaran 1999/2000 yang akan disampaikan kepada Bupati Lamongan, maka beberapa tanggapan dan pendapat yang dapat kami sampaikan, sebagai berikut :

1. Analisa terhadap sistematika penyusunan materi Pertanggung jawaban yang dibuat oleh Kepala Desa Kreteranggan, telah memenuhi syarat , yakni berpedoman pada surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur, tanggal 23 Desember 1991, nomor : 411.6/30099/013/1991, perihal Petunjuk Naskah Pertanggung jawaban dan keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Desa, serta surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, tanggal 27 Januari 1992, nomor : 411.6/321/410.012/1992, perihal Petunjuk naskah Pertanggung jawaban dan keterangan Pertang-gung jawaban Kepala Desa.
2. Adapun yang perlu mendapatkan perhatian Saudara Kepala Desa adalah sebagai berikut :

A. BIDANG PEMERINTAHAN.

1. Kegiatan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat untuk sementara agar meng-gunakan Balai Desa selama belum memiliki Kantor Desanya.
2. Dokumen penting Negara maupun arsip - arsip Pemerintah Desa lainnya supaya disimpan dengan tertib dan baik serta tetap - dijaga kerahasiaannya.
3. Kegiatan Hansip maupun sistim keamanan secara suakarsa supa-ya diaktifkan kembali serta tetap mewaspadaai setiap gangguan keamanan yang timbul, baik pencurian, penipuan dan perampok-an di Wilayah Desanya.

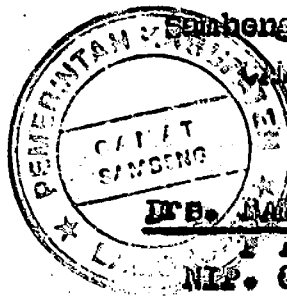
B. BIDANG PEMBANGUNAN.

1. Tumbuhkan kesadaran dan partisipasi geteng-reyong warga masya-rakat pada setiap kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di - Desa. Hal ini sebagai upaya menyongsong pelaksanaan otonomi riel desa nantinya.

C. BIDANG KEMASYARAKATAN.

1. Dalam setiap musyawarah/membahas/memecahkan permasalahan Pe-merintahan dan pembangunan Desa, diharapkan selalu melibatkan Tokoh masyarakat/ulama, pemuda, remas dan PKK Desa.
2. Tetap menjalin kerja sama yang baik dan harmonis diantara Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan yang ada.

Demikian tanggapan dan pendapat yang dapat kami sampaikan guna melengkapi laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa Kreteranggan Kecamatan Sambeng, tahun anggaran 1999 / 2000 , untuk menjadikan maklum.

Sambeng, 12 Juni 2000
Kecamatan SAMBENG

DRB. SAMBANG SULISTYO
PENATA
NIP. 010 060 119

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Pemerintah Desa Kreteranggon pada tahun 2000/2001 dapat menyusun - Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang tertuang pada Undang - undang Nomor :05 Tahun 1996 Pasal 70 - ayat 2 dan sebagaiberikut :

Dalam menjalankan Hak,wewenang dan kewajiban Pimpinan Pemerinta-
tahan Desa yang di maksud dalam ayat 9 (1) Kepala Desa :

- a. Bertanggungjawab kepada Pejabat yang berwenang melalui Camat.
- b. Memberikan keterangan Pertanggungjawaban tersebut kepada L M D.

Samoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Rahmad, Taufikdan Hi-
dayahnya, sehingga dapat melaksanakan tugas - tugas Pemerintahan,
Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat dengan sebaik - baiknya.

Kreteranggon, 25 Mei 2000



ISI BUKU

S A B I : PENDAHULUAN.

A. DASAR HUKUM.

B. DASAR UMUM.

- DATA WILAYAH / DESA

- DATA PENDUDUK

- DATA PENDIDIKAN

- DATA PENGALAMAN

B A B II : PENYELENGGARAAN WAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS.

1. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA.

2. SUSUNAN ORGANISASI TMD

B. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA.

1. ADMINISTRASI UMUM.

2. ADMINISTRASI PENDUDUK.

3. ADMINISTRASI KEUANGAN.

C. PENETAPAN KEBIJAKSAMAAN.

1. CARA PENETAPAN.

2. JUMLAH KEBIJAKSAMAAN.

D. UPAYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI.

1. JUMLAH PERSONEL.

2. TINGKAT PENDIDIKAN.

3. JENIS KELAMIN.

4. DUKUNGAN PERALATAN YANG ADA.

5. DUKUNGAN PEMBIAYAAN.

E. UPAYA PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN HASIL PEMANGUNAN.

F. UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

G. UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI ALAT-ALAT PEMERINTAHAN DESA.

H. PEMERINTAHAN LEMBAGA MASYARAKATAN LEMBAGA ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN MASYARAKAT.

B A B III : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM.

A. UPAYA PENINGKATAN KETATAAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

B. UPAYA PENINGKATAN PERWUJUTAN P-4.

C. UPAYA PENINGKATAN PROGRAM SEKTORAL.

B A B

IV : PELAKSANAAN APPEL

A. JUMLAH APPEL YANG TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DESA.

1. JUMLAH/BIKSAHWA APPELTAHUN YANG LALU.

2. JUMLAH/BIKSAHWA APPEL TAHUN YANG MERSANGHEUTAN.

B. JAKIS DAN JUMLAH BIAYA DARI MASENG MASENG K KUGLAKAN.

C. TARGEY YANG DIRENCANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI.

1. APPEL TAHUN YANG LALU.

2. APPEL TAHUN YANG MERSANGHEUTAN.

B A B

V : PERMASALAHAN.

A. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.

B. UDAMA UDAMA YANG TELAH DILAKSANAKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN.

C. PERMASALAHAN YANG BELUM TERSELESAKAN DAN SARAN PEMECAHANNYA.

B A B

VI : LAIN - LAIN

VII : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN - SARAN

BAB I PENDAHULUAN

Pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 diarahkan kepada usaha memperkuat kedudukan pemerintahan Desa agar mampu menggerekkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan dan mampu menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam arti mampu membiayai kegiatan rutin dan pembangunan dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa ini dibuat dalam rangka Bapok Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, tanggal 20 April 1993 Nomor : 411.6/754/410.012/1993 Perihal pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa dan laporan pelaksanaan program kerja tahunan Desa Kelurahan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor: 5 tahun 1979 pokok-pokok pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa/perangkat Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 tahun 1982 tentang surat sumber pendapatan dan kekayaan Desa pengurusan dan pengawasan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1982 tentang pengutan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1982 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala Desa Sekdes, Kaur dan Kasun.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1982 tentang penyusunan dan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1984 tentang hak dan kewajiban Kepala Desa/ pemerintahan kelurahan sebagai pimpinan pemerintahan Desa/ pemerintahan kelurahan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1984 tentang tata cara pemberian pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 1989 tentang penyusunan program kerja tahunan Desa/ kelurahan.

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 tahun 1987 tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa pengurusan dan pengawasannya.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 tahun 1987 tentang pungutan Desa.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 20 tahun 1987 tentang penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala Desa Sekdes, Kaur, Kasun.
15. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 48 tahun 1990 tentang penyusunan program kerja tahunan Desa/ kelurahan.
16. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang :
 - a. Tanggal 30 September 1991 Nomor 411.06/3038/410.012/1991 perihal pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai pelaksana peraturan Menteri Dalam-Negeri Nomor 5 tahun 1984.
 - b. Tanggal 27 Januari 1992 nomor 411.06/321/410.012/1992 perihal petunjuk naskah pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
 - c. Tanggal 20 April 1993 Nomor 410.6/757/410.012/1993 perihal pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa dan laporan pelaksanaan program kerja tahunan Desa / Kelurahan.

B. DATA U P U H.

a. Data wilayah

Batas batas Desa

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| - Sebelah utara | : Desa Kedudukbembem Mantup. |
| - Sebelah Timur | : Desa Sumber dadi Mantup. |
| - Sebelah selatan | : Desa Solorejo |
| - Sebelah Barat | : Desa Solorejo. |

b. Data Penduduk.

Jumlah penduduk Desa Kreteranggan tahun 2000 sebanyak 3.706 jiwa terdiri dari :

- | | |
|-----------|---------------|
| Laki-laki | : 1.803 jiwa. |
| Perempuan | : 1.883 jiwa. |

C.....

c. Data Pendidikan.

Adapun untuk usia sekolah tamatan tahun 1999/2000 sebagai berikut :

- Perguruan Tinggi sebanyak :	-	jiwa
- Tingkat SMA	: 22	"
- Tingkat SLTP	: 89	"
- Tingkat SD	: 64	"
- Tingkat TK	: 53	"

d. Data mata Pencarian.

Mata pencarian penduduk Desa Krotaranggan sebagai berikut :

- PNS/ABRI	: 23	jiwa
- Pedagang	: 31	"
- Petani	: 2.082	"
- Buruh tani	: 127	"
- Lain lain	: -	"

B A B II

PENYELENGGARAAN WAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAN URAIAN TUGAS.

1. Susunan organisasi pemerintahan Desa dan perangkat Desa :

a. SUPRIADI. S.Ag.	: Kepala Desa
b. S O' I M	: Sekdes
c. SUWANAN	: Kaur Pem.
d. ARIFIN	: " Bang.
e. ABDULLOH	: " Umum.
f. ANILAN	: " Kesra.
g. JANOKO	: " Kcu.
h.	: Kasun Kedungsaluk.
i. SUROSO	: " Rangon
j.	: " Ploren.
k. MAT SHOLEH	: " Krete
l.	: " Gondoroso.
m. MULYADI	: " Balongrejo.
n.	: " Tampingrejo.

2. Susunan organisasi LMD sebagai berikut :

a. SUPRIADI. S.Ag.	: Ketua.
b. S O' I M	: Sekretaris.
c. MULYADI	: Ketua Bidang I Pemerintahan.
d. RODJI	: Anggota.
e. H. MAHFUD	: "
f. MAT SHOLEH	: "

g. Drs. SALIK	: KETUA II BIDANG BANG. PERSEK.
h. SYAMSUL HUDA	: Anggota
i. AMINAN	: "
j. M.ROBIN	: "
k. IMAN MALIKI	: "
l. Drs. KASMANAN	: KETUA III BIDANG KESRA
m. KASIPIN	: Anggota
n. YADE, UN	: "
o. S A, I	: "
p. SADIQ	: "
q. SUKARNO JOKO S	: "

B. Penyelenggaraan Administrasi Desa :

1. Administrasi Umum terdiri dari 7 buku yaitu :

a. Buku Keputusan Desa	(A 1)	Terisi dengan baik
b. Buku Keputusan Kepala Desa	(A 2)	sda
c. Buku Agenda	(A 3)	sda
d. Buku Expedisi	(A 4)	sda
e. Buku Aparat Pemerintahan Desa	(A 7)	sda
f. Buku Cuti Perangkat	(D 1)	sda
g. Buku Register dan Paket	(E 7)	sda

2. Administrasi Penduduk terdiri 7 buku yaitu :

a. Buku Induk Penduduk	(B 1)	Terisi dengan baik
b. Buku Penduduk Sementara	(B 2)	sda
c. Buku Perubahan Penduduk	(B 3)	sda
d. Buku Perkembangan Penduduk	(B 4)	sda
e. Buku Kartu Keluarga	(B 5)	sda
f. Buku Kartu Tanda Penduduk	(B 6)	sda
g. Buku Jumlah Penduduk	(B 7)	sda

3. Administrasi Keuangan terdiri dari 3 buku yaitu :

a. Buku Anggaran Desa	(C 1)	Terisi dengan baik
b. Buku Kas Umum	(C 2)	sda
c. Buku Kas Pembantu	(C 3)	sda

C. Penetapan Kebijakan

1. Kebijakan yang ditempuh Oleh Pemerintahan Desa Tahun Anggaran-
1999/2000 berpijak pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku -
dalam arti luas, semua Kebijakan yang ditempuh melalui :
Musyawarah, Mufakat, baik dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat RT/RW -
LMD dan pada umumnya LMD.

2. Jumlah Kebijaksanaan antara lain :

- a. Tanggal 22 Februari 1998 Keputusan Desa Tentang Program - Kerja Tahunan Desa tahun 1999/2000
- b. Tanggal 10 April 1999 Keputusan Desa Tentang Penetapan- Sewa TED
- c. Tanggal 14 Nopember 1995 Keputusan Desa Tentang Pemakaian Jalan Desa
- d. Tanggal 10 April 1998 Keputusan Desa Tentang APPKD Tahun 1999/2000.

D. Upaya Peningkatan Swadaya Masyarakat.

1. Swadaya Masyarakat tahun 1999/2000 jika dibandingkan dengan tahun 1998/1999 terdapat Peningkatan sebagai berikut :
 - Swadaya tahun 1999/2000 sebesar Rp. 44.494.000,-
 - Swadaya tahun 1998/1999 sebesar Rp. 41.674.000,-
2. Dengan demikian terdapat peningkatan sebesar Rp. 2.820.000,-
2. Adapun besarnya target APPKD tahun 1999/2000 dan realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Anggaran Rutin.

No. :	Kegiatan	: Target	: Realisasi	: Ket
1.	: Pendapatan Asli Desa	: 4.159.000,-	: 4.159.000,-	:-
2.	: Penerimaan dari Pem. Tk. I	: 3.480.000,-	: 3.480.000,-	:-
3.	: Penerimaan dari Pem. Tk. II	: 940.000,-	: 940.000,-	:-
4.	: Upah pungut PBB	: 425.000,-	: 425.000,-	:-
5.	: Pendapatan lain lain	: 4.940.000,-	: 4.940.000,-	:-
	Jumlah	: 13.944.000,-	: 13.944.000,-	:-

b. Anggaran Pembangunan.

No. :	Kegiatan	: Target	: Realisasinya	: Ket
1.	: Pendapatan Asli Desa	:	:	:
	: - Swadaya berupa uang	: 9.000.000,-	: 9.000.000,-	:
	: - Partisipasi masyarakat	: 10.230.000,-	: 10.230.000,-	:
2.	: Subsidi Pem. Pusat	:	:	:
	: Dana Bantuan Desa	: 9.000.000,-	: 9.000.000,-	:
	Jumlah	: 28.230.000,-	: 28.230.000,-	:

3. Upaya - upaya yang kami tempu kami selaku Kepala Desa Kreterang -
 gon telah mengambil kesimpulan untuk mengumpulkan Perangkat Desa
 LMD, LMD, Tokoh masyarakat serta lembaga lainnya berusaha mewujudkan
 dan rencana yang di anggarakan tahun 1999/2000 dengan jalan pem-
 bangunan yang belum terlaksana di maksud dalam tahun anggaran 20-
 00 / 2001.

E. Upaya penyederhanaan Organisasi.

Organisasi Pemerintahan Desa Kreteranggon dapat di jalankan seba-
 gai berikut :

No. :	N a m a	Umur:	L/p	Jabatan	Pend :	No. SK
1.	Supriadi S.Ag	29	L	Kepala Desa	S1	SK. No. 3
2.	S o : i m	54	B	Sekdes	SD	55/2000/1995
3.	Sumanan	29	L	Kaur Pem.	SLA	Tb. 1995
4.	Arifin	35	L	Kaur Bang	SLP	38 Tb. 1988
5.	Amilan	50	L	Kaur Kepra	M1	46 Tb. 1985
6.	Abdullah	36	L	Kaur Umum	SLP	36 Tb. 88
7.	Janeke	30	L	Kaur Ken	SLP	Tb. 1991
8.	Suroso	36	L	Kasun Ronggon	SD	64 Tb. 1991
9.	Mat Sholeh	46	L	Kasun Kreto	SD	47/422/743
10.	Mulyadi	39	L	Kasun Bl.Rejo	SLP	30 Tb. 1986

- Anggota LMD tahun 1999/2000 sebagai berikut :

No. :	N a m a	Umur:	L/P	Jabatan	Pend. :	Ret
1.	Supriadi S.Ag	Ketua	L	Ketua	PT	SK.No. 3
2.	S o : i m	53	L	Sekretaris	SD	Tb. 1999
3.	Mulyadi	39	L	Ketua I Bid. Pem	SLP	Tb. "
4.	R o j i	43	L	Anggota	M1	"
5.	H. Mahfud	40	L	"	PT	"
6.	Mat Sholeh	46	L	"	SD	"
7.	Samsul Huda	38	L	"	MA	"
8.	Drs. Salik	42	L	Ketua II Bid. Bang.	PT	"
9.	Aminon	55	L	Anggota	SD	"
10.	R o b i n	30	L	"	PT	"
11.	Imam Meliki	38	L	"	SLP	"
12.	Kacipin	37	L	"	SD	"
13.	Drs. Kasmanan	38	L	Ketua III Bid. Moe.	PT	"
14.	Yadotun	41	L	Anggota	MTS	"
15.	S o : i	37	L	"	SD	"
16.	S a d i q	38	L	"	SD	"
17.	Sukarno Joko S	37	L	"	SFG	"

- Dukungan peralatan yang ada :
Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari - hari Perangkat Desa telah kami upayakan kecukupan peralatan seperti :
Meja, Kursi, Almari, dan sebagainya namun perlu di sampaikan lagi pada tahun - tahun yang akan datang.
- Dukungan Pembiayaan :
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sumber biaya yang di pergunakan, sesuai dengan ketentuan yang telah di atur pada APPKD Tahun 1999/2000.
- F. Upaya pemeliharaan dan peningkatan Pembangunan :
Upaya pemeliharaan dan peningkatan hasil Pembangunan di Desa Kreteranggan Kecamatan Sambong Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan prasarana fisik selalu ada pengawasan dari Aparat Desa LKMD bahkan dari warga Masyarakat dan mengadakan perbaikan apabila bangunan rusak dan menjadi kewajiban, pemeliharaan tiap - tiap tiga bulan sekali oleh warga Masyarakat.
 - b. Pembangunan prasarana Non fisik tetap kami adakan pembinaan - Kepala LKMD, PKK, Karang Taruna, Hansip dan warga Masyarakat se tiap ada pertemuan agar segala pembangunan di tiap - tiap sektor bisa di tingkahkan.
- G. Upaya Pelayanan/Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan terhadap Masyarakat antara lain :
Buka Kantor pada Jam - jam Dinas (Sesuai dengan Instruksi Bupati Nomor : 09 Tahun 1997) Antara lain :
 - Senin s/ d Kamis Pukul : 07.00 s/d 14.00
 - Jumat Pukul : 07.00 s/d 11.00
 - Sabtu Pukul : 07.00 s/d 12.00
- H. Upaya peningkatan penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kreteranggan mulai Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Tiap - tiap Perjalanan Dinas aparatur Perangkat Desa Kreteranggan mendapatkan biaya perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam APPKD.
 - Memberikan Honorarium anggota LMD setiap Tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam APPKD.
 - Mendapatkan Penghasilan dari warga masyarakat yang memerlukan surat menyurat antara lain : Surat Pinda Tempat, Surat RT/RW, Jual Rumah, Jual Ternak Ijin Keramaian dan lain - lain sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam keputusan Desa.

I. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan .

Untuk meningkatkan peran serta terhadap pelaksanaan Pembangunan di Desa maka Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa secara terus menerus kami adakan pembinaan antara lain sebagai berikut :

- LKMD setiap bulan sekali pada pertemuan bulanan.
- PKK satu bulan sekali dua kali pada waktu pertemuan kader PKK dan pada waktu arisan PKK.
- RT/RW setiap tiga bulan sekali dan bila perlu setiap ada kegiatan,

B A B I I I

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Upaya peningkatan ketaatan dalam ketertiban masyarakat :

Data Keamanan :

- Jumlah POS Kamling : 7 Bush
- Jumlah Anggota Hansip : 270 Orang.

Kegiatan Hansip :

- Latihan PBB setiap bulan sekali
- Peningkatan pelaksanaan siskamling
- Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Pemerintah.
- Mengadakan ceramah tentang kesadaran hukum pada waktu kegiatan bulan bakti LKMD.
- Melaksanakan kegiatan ronda malam/ jaga malam.
- Ikut berpartisipasi dalam kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- Mengikuti kegiatan yang diadakan Oleh Kecamatan.
- Dan lain - lain yang diperlukan Desa sesuai dengan tugas tugas keamanan/ kehansipan.

B. Upaya peningkatan "embudayaan" P 4.

Untuk Tahun 1996/1997 dari Desa Kreteranggon juga mengirimkan unsur PKK ke Kecamatan untuk mengikuti Penataran P-4 pola Pendukung 25 Jam .

Demikian juga Warga masyarakat Desa Kreteranggon sampai dengan Tahun 1998 / 1999 telah terjangkau pemberdayaan P-4 sebagai berikut :

- | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|--------|
| a. Jumlah Penduduk usia Dewasa | : | 2853 | Orang. |
| b. Telah mengadakan penataran P-4 | : | 1.055 | Orang |
| c. Telah mengikuti Fasilitator | : | 94 | Orang |
| d. Menjadi wajar Simulasi P-4 | : | 613 | Orang |
| e. Jumlah kejar simulasi P-4 | : | 18 | Orang |
| f. Jumlah lanjut usia/Jompo | : | 1.058 | Orang |

C.

C. Upaya Peningkatan Program sektoral :

Untuk meningkatkan taraf hidup petani Desa Kreteranggon dengan memperluas kesempatan kerja dan menjamin kesediaan pangan untuk masyarakat maka tahun 1999/2000 telah dilaksanakan intensifikasi tanaman padi dan palawija.

- SEKTOR PERTANIAN.

- Intensifikasi Padi :

Luas tanaman	: 175.010 Ha.
Luas panen	: 175.010 Ha.
Hasil Produksi	: 962.555 Ton
Rata-rata - rata per Ha.	: 5,5 Ton.

- Intensifikasi Kedelai

Luas tanaman	: 5.100 Ha.
Luas Panen	: 5.100 Ha.
Hasil Produksi	: 765 Ton
Rata-rata per Ha	: 1,5 Ton.

- Intensifikasi Kacang hijau ;

Luas Tanaman	: 3.100 Ha.
Luas Panen	: 3.100 Ha.
Hasil Produksi	: 3,1 Ton
Rata-rata per Ha	: 1 Ton.

Intensifikasi Jagung

Luas Tanaman	: 5.200 Ha.
Luas Panen	: 5.200 Ha.
Hasil Produksi	: 15,6 Ton
Rata-rata Per Ha	: 3 Ton.

- SEKTOR KOPERASI

Sektor Koperasi untuk Desa Kreteranggon kami anjurkan untuk ikut menjadi Anggota KUD Utama KUT, TRI dan para pengusaha lainnya.

- Membentuk Kas Sippan Pinjam di tiap - tiap Dusun.

- Memanfaatkan Lumbung Desa yang kegiatannya pada waktu - Musim panen kami anjurkan untuk menyimpan dan waktu musim tanam tiba simpanan bisa di ambil.

SEKTOR TRANSMIGRASI

Mengadakan penyuluhan ke Dusun - dusun untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya ikut Transmigrasi sehingga pada tahun 1999/2000 anggota kepala keluarga yang telah pindah Tempat nya bertujuan kepemukiman Transmigrasi yang berasal dari Desa Kreteranggon.

SEKTOR

SEKTOR PENDIDIKAN.

Tingkat pendidikan :

1. Hasil pembinaan tahun 1998/1999 :

Jumlah penduduk	: 3.694 orang
- Tamatan SD sederajat	: 62 "
- Tamatan SLF sederajat	: 98 "
- Tamatan SLA sederajat	: 32 "
- Tamatan PT	: - "

2. Hasil pembinaan tahun 1999/2000 :

Jumlah Penduduk	: 3.706 orang
- Tamatan SD sederajat	: 64 "
- Tamatan SLF sederajat	: 89 "
- Tamatan SLA sederajat	: 22 "
- Tamatan PT	: - "

B A B I V
PELAKSANAAN A P P K D

A. JUMLAH APPKD YANG TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DESA :

1. Jumlah/besarnya APPKD tahun yang lalu (1998/1999).
2. Jumlah/besarnya APPKD tahun 1999/2000 baik rutin maupun Pemba-
ngunan sebagaimana terlampir.

B. TARGET YANG DIRENCANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI :

1. APPKD tahun 1998/1999 sebagai berikut :

- 1.a.1 Rencana anggaran rutin 1998/1999 sebesar Rp. 11.624.000,-
dengan perincian sebagai berikut :

No. :	Kegiatan	: Rencana	: Hasil yang	: Ket.
:	:	:	: dicapai	:
1.	: Pendapatan asli Desa	: 5.000.000	: 5.000.000	: -
2.	: Penerimaan dr. Pem. Tk. I	: 1.800.000	: 1.800.000	: -
3.	: Penerimaan dr. Pem. Tk. II	: 122.000	: 122.000	: -
4.	: Dari retribusi	: 807.000	: 807.000	: -
5.	: Pendapatan lain lain	: 3.894.000	: 3.894.000	: -
Jumlah		: 11.624.000	: 11.624.000	: -

- 1.a.2 Rencana pengeluaran anggaran rutin tahun 1998/1999 sebesar
Rp. 11.624.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No. :	Kegiatan	: rencana	: Hasil yang	: Ket.
:	:	:	: dicapai	:
1.	: Pos belanja pegawai	:	:	:
	: Penghasilan Kades dan Pamdes	: 7.080.000	: 7.080.000	: -
	: Honor AMD dan LKMD	: 576.000	: 576.000	: -
2.	: Pos belanja barang	:	:	:
	: Pembelian ATK	: 200.000		

2. : Pos belanja barang	:	200.000	:	200.000	:	-
3. : Pos biaya pemeliharaan	:		:		:	
: Kantor dan Balai Desa	:	300.000	:	300.000	:	-
4. : Pos biaya perjalanan Dinas	:		:		:	
: Perjalanan Kades dan Pongos	:	622.000	:	622.000	:	-
5. : Pos belanja lain lain	:		:		:	
: Pembinaan KB kader gini dan hamsip	:	401.000	:	401.000	:	-
: Honor 2 Guru Tk PKMD RT/RW	:	850.000	:	850.000	:	-
: Pembelian 3 kabar paksaian buku per	:	350.000	:	350.000	:	-
: Pembinaan kelompok aspir	:	100.000	:	100.000	:	-
: Penseertifikatan TKD	:	550.000	:	550.000	:	-
: Purna bakti Kades	:	120.000	:	120.000	:	
6. : Pos pengeluaran tak terduga	:		:		:	
: Kebutuhan lain lain tak terduga	:	375.000	:	375.000	:	-
Jumlah	:	11624.000	:	11.624.000	:	

1.b.1 Rencana penerimaan pembangunan tahun 1998/1999 sebesar
Rp. 30.050.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No. :	Kegiatan	:	Rencana	:	Hasil yang	:	ket
					dicapai		
1. :	Pendapatan asli Desa	:		:		:	
	: Swadaya berupa uang	:	10.500.000	:	10.500.000	:	
	: Partisipasi masyarakat	:	10.650.000	:	10.650.000	:	
2. :	Pendapatan lain lain yang sah	:		:		:	
	: menurut UU.	:	2.400.000	:	2.400.000	:	
3. :	Subsidi Pemerintah pusat	:		:		:	
	: Impres Bandar	:	6.500.000	:	6.500.000	:	
Jumlah		:	30.050.000	:	30.050.000	:	

1.b.2 Rencana pengeluaran pembangunan tahun 1998/1999 sebesar
Rp. 30.050.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No. :	Kegiatan	:	Rencana	:	Hasil yang	:	ket
					dicapai		
1. :	Pos prasarana pemerintah Desa	:		:		:	
	: Pembangunan Balai Desa Jogle Rg.	:	4.500.000	:	4.500.000	:	
2. :	Pos prasarana produksi	:		:		:	
	: penanaman tanaman produktif	:	610.000	:	610.000	:	
3. :	Pos prasarana perhubungan	:		:		:	
	: Pemb. gorong dan pangeran jalan	:	5.500.000	:	5.500.000	:	
4. :	Pos prasarana pemasaran	:	-	:	-	:	

1 :	2 :	3 :	4 :	5 :
5. : Pos pembaruan sosial	:	:	:	:
: Rehab masjid Gd	:	1.000.000	:	1.000.000 :
: Rehab masjid dan musholla Kd	:	17.000.000	:	17.000.000 :
6. : Pos pembangunan lain lain	:	:	:	:
: Pokan orientasi LMD	:	225.000	:	225.000 :
: Bulan bakti LMD	:	215.000	:	215.000 :
: Kebersihan Lingkungan	:	1.000.000	:	1.000.000 :
Jumlah	:	30.050.000	:	30.050.000 :

2. APBD tahun 1999/2000 sebagai berikut :

2.a.1 Rencana penerimaan anggaran rutin tahun 1999/2000 sebesar
Rp. 13.944.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No. :	Revisi	:	rencana	:	Hasil yang	:	ket
					dicapai		
1. :	Pendapatan asli Desa	:	4.159.000	:	4.159.000	:	:
2. :	Penghasilan dr. Pan. Pusat	:	840.000	:	840.000	:	:
3. :	Penerimaan dr. Pan. Tk. I	:	2.400.000	:	2.400.000	:	:
4. :	Penerimaan dr. Pan. Tk. II	:	1.365.000	:	1.365.000	:	:
5. :	Pendapatan lain lain yang sah	:	:	:	:	:	:
	: menurut UU	:	3.890.000	:	3.890.000	:	:
Jumlah		:	13.944.000	:	13.944.000	:	:

2.a.2 Rencana pengeluaran anggaran rutin tahun 1999/2000 sebesar
Rp. 13.944.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No. :	Revisi	:	Rencana	:	Hasil yang	:	ket
					dicapai		
1. :	Pos belanja pegawai	:	:	:	:	:	:
	: Penghasilan Kades dan Par. Dc	:	7.080.000	:	7.080.000	:	:
	: Honor 2 Guru TK	:	300.000	:	300.000	:	:
	: Tunjangan Kades dan perangkat	:	3.480.000	:	3.480.000	:	:
2. :	Pos belanja barang	:	:	:	:	:	:
	: Pembelian ATK	:	525.000	:	525.000	:	:
3. :	Pos biaya perjalanan	:	—	:	—	:	:
4. :	Pos belanja lain lain	:	:	:	:	:	:
	: Honor TMD, RT/RW, LMD, LMD	:	1.400.000	:	1.400.000	:	:
	: Pembinaan Hamsip Karang T.	:	150.000	:	150.000	:	:
	: Pemsertifikatan TMD	:	550.000	:	550.000	:	:
	: Purna bakti Kades	:	120.000	:	120.000	:	:
5. :	Pos biaya pemeliharaan	:	:	:	:	:	:
	: Kantor dan Balai Desa	:	300.000	:	300.000	:	:
6. :	Pos pengeluaran tak terduga	:	40.000	:	40.000	:	:
Jumlah		:	13.944.000	:	13.944.000	:	:

2.b.

2.b.1 Anggaran penerimaan Pembangunan tahun 1999/2000 sebesar
Rp. 30.550.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No. :	Kegiatan	Rencana	Hasil yang : dicapai	Ket
1. :	Pendapatan asli Desa	:	:	:
	: Swadaya berupa uang	: 10.000.000	: 10.000.000	:
	: Partisipasi masyarakat	: 10.550.000	: 10.550.000	:
2. :	Subsidi Pemerintah Pusat	:	:	:
	: Dana Bantuan Desa	: 10.000.000	: 10.000.000	:
	Jumlah	: 30.550.000	: 30.550.000	:

2.b.2 Rencana pengeluaran pembangunan tahun 1999/2000 sebesar
Rp. 30.550.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No. :	Kegiatan	Rencana	Hasil yang : dicapai	Ket
1. :	Pos prasarana Pemerintahan Desa	:	:	:
	: Pembangunan Kantor Desa	: 5.000.000	: 5.000.000	:
2. :	Pos prasarana produksi	:	:	:
	: Penanaman tanaman produktif	: 610.000	: 610.000	:
3. :	Pos prasarana perhubungan	:	:	:
	: Pembangunan Gorong Krote, Kd.	: 2.250.000	: 2.250.000	:
	: Pengeronjangan Jembatan Kd.	: 3.000.000	: 3.000.000	:
	: Pengerasan jalan Desa	: 3.000.000	: 3.000.000	:
4. :	Pos pembangunan prasarana pemasa:	:	:	:
5. :	Pos pembangunan prasarana sosial:	:	:	:
	: Rehab Masjid dan Musholla Kd.	: 5.500.000	: 5.500.000	:
6. :	Pos pembangunan lain lain	:	:	:
	: Bulan bakti LKMD, PO LMD	: 440.000	: 440.000	:
	: Kegiatan PKK, Pemuda dan anak ran:	: 2.000.000	: 2.000.000	:
	: Pembangunan ekonomi produktif Da:	: 8.000.000	: 8.000.000	:
	: Kebersihan lingkungan	: 750.000	: 750.000	:
	Jumlah	: 30.550.000	: 30.550.000	:

B A B V

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi di Desa Kreteranggon yaitu :

- Sepanjang perjalanan pelaksanaan anggaran rutin maupun pembangunan tahun 1999/2000 terhadap permasalahan yaitu yang tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan dikarenakan masih adanya sebagian masyarakat yang kurang pengertian tentang swadaya, anggaran masyarakat yang keuangannya hanya untuk pembangunan fisik saja dan apabila petugas pemangut tidak melaksanakan pemangutan masyarakat tidak akan membayar kalau tidak ada pemangutan.

Ungut itu dari aparat Desa, LMD, pengurus LMD, Tokoh masyarakat serta Lembaga Lembaga yang lain memaklumiya atau tidak terpenuhi - nya target yang telah diputuskan, namun kami berusaha untuk memberi kan kesadaran kepada masyarakat bahwa swadaya itu untuk kebutuhan - fisik dan pembangunan non fisik.

B. Permasalahan yang belum terselesaikan dan saran pemecahannya.

Hasil kesepakatan aparat Desa, LMD, tokoh masyarakat serta Lembaga - lainnya berusaha menunjukkan rencana yang dianggarkan pada tahun - anggaran 1999/2000 dengan jalan pembangunan yang belum terlaksana - dilaksanakan dalam tahun anggaran 2000/2001.

C. Usaha usaha yang telah dilaksanakan yaitu :

- Berusaha memberikan penyuluhan kepada warga di tiap tiap dusun ten - tang kesadaran untuk membayar swadaya guna pembangunan fisik maupun non fisik.
- Melaksanakan pungutan swadaya pada waktu para petani masuk panen pada perkiraan bulan april dan bulan september pada waktu panen terbanyak.

B A B V I

P E N U T U P

Demiikian laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 1999/2000 dapat kami buat dan kami lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada, guna sebagai bahan Evaluasi terhadap tugas kami selaku Kepala Desa dan sudah barang tentu laporan ini ada kerugiya dan lebihnya untuk saran pendapat selalu kami harapkan, guna peningkatan terha - dap tugas tugas kami selaku Kepala Desa.

Krateranggan, 25 Mei 2000.



K A T A - P E N G A N T A R

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Pemerintah Desa Kreteranggon pada tahun anggaran 1999/2000 dapat menyusun keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa guna memenuhi kewajiban Kepala Desa yang tertuang pada Undang-Undang No. 5 tahun 1979 pasal 10 ayat 2.

Dalam menjalankan tugas hak wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa :

- a. Bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang melalui Camat.
- b. Menberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada IMD.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas pemerintahan pembangunan dan pimpinan masyarakat dengan sebaik - baik bailnya.

Kreteranggon, 25 Mei 2000.

KEPALA DESA KRETERANGGON

SURIADI S.Ag.

I S I B U K U

B A B

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

B. DATA UMUM

- Data Wilayah / Desa
- Data Penduduk
- Data Pendidikan
- Data Mata Pencarian

B A B

II. PENYELENGGARAAN WAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. SUSUNAN ORGANESASI DAN URAIAN TUGAS

1. Susunan Organisasi Pemerintahan dan Perangkat Desa

2. Susunan Organisasi L M D

B. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA

1. Administrasi Umum

2. Administrasi Penduduk

3. Administrasi Keuangan

C. PENETAPAN KEBIJAKESANAAN

1. Cara Penetapan

2. Kebijakansean

D. UPAYA PENINGKATAN SWADAYA MASYARAKAT

1. Peningkatan Swadaya Tahun yang lalu dengan Tahun yan berikutnya.

2. Pertanggung target dengan realisasi yang dicapai

3. Upaya - upaya yang di tempuh.

E. UPAYA MENYEDERHANAAN ORGANESASI

1. Jumlah Personil

2. Tingkat Pendidikan

3. Jenis kelamin

4. Dukungan Peralatan yang ada

5. Dukungan Pembiayaan

F. UPAYA PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN HASIL PEM BANGUNAN

G. UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

H. USAHAPENINGKATAN PENGHASILAN APARATUR PEMERIN HAN DESA

I. PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ,LEMBAGA ADAT ADAT ISTIADAT, DAN KEBIASAAN _ KEBIASAAN.

B A B III. P E N U T U P.

B A B I

P E R E D A H U L U A N

Pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 di arahkan kepada Usaha memperkuat kedudukan Pemerintahan Desa agar mampu menggerakan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan mampu menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam arti mampu membiayai kegiatan - kegiatan dan pembangunan serta mampu memberikan pelayanan kepa masyarakat.

Penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala De Desa ini di buat dalam rangka memenuhi syarat Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, Tanggal 20 April 1992 : 411.6/321/410.012 /1992 perihal pertanggung jawaban dan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

A. DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok - pokok Pemerintahan di Desa.
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1982 tentang sumber Pendapatan dan Keayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1982 tentang Fungsi Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1982 tentang penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1982 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala - kepala Dusun.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak - wewenang dan Kewajiban Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 tentang tata cara Pemberian Pertanggungjawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur, Nomor 12 Tahun 1987 tentang sumber Pendapatan dan Keayaan Desa pengurusan dan pengawasan.
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur, Nomor : 19 Tahun 1987 tentang Fungsi Desa.

12. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor : 20 Tahun - 1987 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa .
13. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur, Nomor : 21 Tahun- 1987 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa Kepala - kepala Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 48 - Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja Tahunan DS.
15. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
 - a. Tanggal 30 September 1991 Nomor : 411.6/3038/410.012/1991 Perihal Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa sebagai Pelaksana Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984
 - b. Tanggal 27 Januari 1992 Nomor : 411.6/321/410.012/1992. Perihal Petunjuk naska Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa.
 - c. Tanggal 20 April 1993 Nomor : 411.6/757/410.012/1993 Perihal Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja Tahunan Desa/ Kelurahan.

B. DATA UMUM :

1. Data Wilayah :

- Batas-batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Kedukbeben Kec. Mantup
 - Sebelah Timur : Desa Sumberdadi Kec. Mantup
 - Sebelah Barat : Desa Selorejo Kec. Sembeng
 - Sebelah Selatan : Desa Selorejo Kec. Sembeng
- Jumlah Penduduk Desa Kreteranggan Tahun 2000 sebanyak : 3706 Jiwa terdiri :
 - Laki-laki : 1803 Jiwa
 - Perempuan : 1883 Jiwa
- Adapun usia untuk usia Sekolah Tamat Tahun 2000
 - Perguruan Tinggi sebanyak : - Jiwa
 - Tingkat SLTA sebanyak : 22 Jiwa
 - Tingkat SLTP sebanyak : 89 Jiwa
 - Tingkat SD sebanyak : 64 Jiwa
 - Tingkat TK sebanyak : 55 Jiwa
- Mata Pencarian penduduk Desa Kreteranggan
 - Pegawai Negeri/ABRI : 23 Jiwa
 - Pedagang : 31 Jiwa
 - Petani : 2022 Jiwa
 - Buruh Tani : 127 Jiwa
 - Lain-lain : - Jiwa

PENYELENGGARAAN WAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

1. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa :

a. Supriadi S.a.g	: Kepala Desa
b. S o, i m	: Sekretaris Desa
c. Suwanan	: Kepala Urusan Pemerintahan
d. Arifin	: Kepala Urusan Pembangunan
e. Amilan	: Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
f. Abdullah	: Kepala Urusan Umum
g. Janoko	: Kepala Urusan Keuangan
h. -	: Kepala Dusun Kedungsaluk
i. Suroso	: Kepala Dusun Ranggon
j. -	: Kepala Dusun Ploreg
k. Mat Sholeh	: Kepala Dusun Krete
l. -	: Kepala Dusun Gondoroso
m. Mulyadi	: Kepala Dusun Balongrejo
n. -	: Kepala Dusun Tampingrejo

2. Susunan Organisasi L. M D :

a. Supriadi S.a.g	: K e t u a
b. S o, i m	: Sekretaris
c. Mulyadi	: Ketua Kel. I Bidang Pemerintahan
d. R o j i	: Anggota
e. H. Mahfud	: Anggota
f. Mat Sholeh	: Anggota
g. Drs. Salik	: Ketua Kel. II Bidang Bang/Perekonomian
h. Samsul Huda	: Anggota
i. Aminan	: Anggota
j. Robin	: Anggota
k. Iman Meliki	: Anggota
l. Drs. Kasmanan	: Ketua Kel. III Bidang Kesra
m. Kasipin	: Anggota
n. Yade,un	: Anggota
o. S a, i	: Anggota
p. Sadiq	: Anggota
q. Sukarno Joko S.	: Anggota

B.....

B. Penyelenggaraan Administrasi Desa :

1. Administrasi Umum terdiri dari 7 buku yaitu :
 - a. Buku Keputusan Desa (A1) terisi dengan baik
 - b. Buku Keputusan Kepala Desa (A2) terisi dengan baik
 - c. Buku Agenda (A3) terisi dengan baik
 - d. Buku Kependidikan (A4) terisi dengan baik
 - e. Buku Aparat Pemerintah Desa (A7) terisi dengan baik
 - f. Buku Cuti Perangkat Desa (D1) terisi dengan baik
 - g. Buku Register Kematian dan Janin (E7) terisi dengan baik
2. Administrasi penduduk terisi dari 7 buku yaitu :
 - a. Buku Induk Penduduk (B1) terisi dengan baik
 - b. Buku Penduduk Sementara (B2) terisi dengan baik
 - c. Buku perubahan Penduduk (B3) terisi dengan baik
 - d. Buku Perkembangan Penduduk (B4) terisi dengan baik
 - e. Buku Kartu keluarga (B5) terisi dengan baik
 - f. Buku kartu tanda penduduk (B6) terisi dengan baik
 - g. Buku jumlah penduduk (B7) terisi dengan baik
3. Administrasi keuangan terdiri dari 3 macam yaitu :
 - a. Buku Anggaran Desa (C1) terisi dengan baik
 - b. Buku Kas Umum (C2) terisi dengan baik
 - c. Buku Kas Pembantu (C3) terisi dengan baik

C. Penetapan Kebijakan :

1. Kebijakan yang di tempu oleh Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 1999 / 2000 berpijak pada peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam arti luas, semua kebijaksanaan yang di tempu melalui musyawarah mufakat baik dengan tokoh - tokoh Masyarakat RT / RW, LKMD dan umumnya LMD.
2. Jumlah Kebijakan antara lain :
 - a. Tanggal 28 Oktober 1992 Keputusan Desa tentang :
Program Kerja Tahunan Desa 1999 / 2000.
 - b. Tanggal 14 Nopember 1992 Keputusan Desa tentang :
Penetapan Desa Tahun Kas Desa.
 - c. Tanggal 14 Nopember 1992 Keputusan Desa tentang :
Pembukaan Jalan Desa.
 - d. Tanggal 24 Februari 1993 Keputusan Desa tentang :
A R T K D Tahun 1999 / 2000.

A. AGGARAN RUPIN

A. ANGGA IN RUTIN.

No : K e g i s t a n	: Rencana	: Hasil yang dicipai	: ket.
1. : Pendapatan Asli Desa	: 4.159.000	: 4.159.000	: -
2. : Penerimaan dr. Pem. Dati I	: 2.400.000	: 2.400.000	: -
3. : Penerimaan dr. Pem. Dati II	: 1.365.000	: 1.365.000	: -
4. : Upah Pungut PBB	: 300.000	: 300.000	: -
5. : Pendapatan lain - lain	: -	: -	: -

B. ANGGARAN PEMBANGUNAN

No. : K e g i s t a n	: Rencana	: Hasil yang di capai	: Ket.
1. : Pendapatan Asli Desa	:	:	:
: Swadaya berupa Uang	: 10.000.000	: 10.000.000	: -
: Swadaya berupa tenaga Material	: 7.940.000	: 7.940.000	: -
2. : Pendapatan lain - lain yang seb	: 1.290.000	: 1.290.000	: -
3. : Subsidi Pemerintah Pusat	:	:	:
: Dana Pembangunan Desa	: 9.000.000	: 9.000.000	: -
J u m l a h	: 28.230.000	: 28.230.000	:

D. Upaya Penyederhanaan Organisasi.

- Organisasi Pemerintahan Desa Kreteranggon dapat di jelaskan sebagai berikut :

No. : N a m a	: Umur L/P	: Jabatan	: Pend.	: Ket
1. : Supriadi S.Ag	: 29 : L	: Kepala Desa	: S 1	: No. SK.
2. : S o : i m	: 53 : L	: Sekdes	: SD	: 1622 Th95
3. : Suwanto	: 29 : L	: Kaur Pem.	: SLA	: Th95
4. : Arifin	: 35 : L	: Kaur Bang.	: SLP	: 38 Tahun
5. : Amilan	: 50 : L	: Kaur Kesra	: MI	: Th
6. : Abdullah	: 36 : L	: Kaur Uraun	: SLP	: 36 Th 88
7. : Janoko	: 30 : L	: Kaur Kep.	: SLP	: Th 91
8. :	:	: Kasun Kd. celuk	:	:
9. : Suroso	: 38 : L	: Kasun Ranggon	: SD	: 64 Th91
10. :	:	: Kasun P. rejo	:	:
11. : Mat Sholeh	: 46 : L	: Kasun Kreterang	: SD	: 47/422/743
12. :	:	: Kasun Gonderoso	:	:
13. : Mulyadi	: 39 : L	: Kasun Bl. rejo	: SLP	: 30 Th86
14. :	:	:	:	:

- Anggota L M D Tahun 1999 / 2000.

No.	N o m a	Umur	L/P	Jabatan	Peng.	Ket.
1.	Supriedi S.Ag	29	L	Ketua	PT	SK No.
2.	S o i m	54	L	Sekretaris	SD	Tb.91
3.	Mulyadi	40	L	Ketua I Bid.Pem	SLP	"
4.	R o j i	43	L	Anggota	MI	"
5.	H. Mohdud	40	L	"	Pt	"
6.	Hot Sholeh	46	L	"	SD	"
7.	Samsul Huda	36	L	"	MA	"
8.	Dra. Salik	42	L	Ketua II Bid.bang.	PT	"
9.	A m l u n	55	L	"	SD	"
10.	Robin	30	L	"	PT	"
11.	Imam Maliki	38	L	"	SLP	"
12.	Kesipin	37	L	"	SD	"
13.	Dra. Kasmanan	38	L	Ketua III Bid.Mas	PT	"
14.	Yade'un	41	L	Anggota	MHS	"
15.	S a i	37	L	"	SD	"
16.	S o o i q	38	L	"	SD	"
17.	Sukarno Joke S	37	L	"	SLP	"

- Dukungan peralatan yang ada.

Untuk mendukung tugas sehari - hari bagi perangkat Desa telah kami upayakan kecukupan peralatan seperti : Meja Korsi Almari dan sebagainya namun perlu juga di sempurnakan lagi pada tahun yang akan datang.

- Dukungan biaya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa sumber biaya yang di gunakan sesuai dengan ketentuan yang di atur pada APPKD Tahun 1999 / 2000.

E. Upaya pemeliharaan dan peningkatan hasil Pembangunan.

Upaya Hasil pembangunan di Desa Kreteranggan Kecamatan Sambeng Kabu - poten Lamongan.

- Pembangunan prasarana fisik selalu ada pengawasan dari aparat Desa LKMD bahwa dari warga Masyarakat dan mengadakan perbaikan apabila - Bangunan dalam keadaan rusak dan akan menjadi kewajiban pemeliharaan tiap - tiap tiga bulan sekali bila perlu satu bulan sekali oleh - warga masyarakat.

- Pembangunan Prasarana non Fisik tetap kami akan mengadakan pembinaan kepada LKMD PKK, Karang Taruna, Lansip dan warga Masyarakat setiap ada pertemuan agar segala pembangunan di setiap sektor bisa di ting- katkan.

F. Upaya Peningkatan / Pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap Masyarakat antara lain buka kantor pada - Jam - Jam dinas (sesuai dengan Intuksi Bupati No. 09 Tahun 1987) antara lain :

- Senin s/d Kamis pada Pukul : 07.00 s/d 14.00
- Jumat pada Pukul : 07.00 s/d 14.00
- Sabtu pada pukul : 07.00 s/d 12.00

G. Upaya peningkatan penghasilan Aparat Pemerintahan Desa Kreteranggon Mulai dari Kepala Desa sampai dengan Perangkat Desa Lainnya selain dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

- Tiap - tiap perjalanan dinas bagi Aparat Pemerintahan Desa Kreteranggon mendapatkan biaya perjalanan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam APBUD.
- Memberikan Honorarium kepada LMD setiap setahun sekali sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam APBUD.
- Mendapat penghasilan tambahan dari warga masyarakat yang memerlukan surat menyurat antara lain :
Surat pindah tempat, Surat KK, Jual tanah, Jual Rumah, Ijin ke - remaian dan lain - lain, yang sesuai dengan ketentuan yang di putuskan dalam keputusan Desa.

H. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

- Untuk meningkatkan peran serta terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, maka Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa secara terus menerus kami adakan pembinaan antara lain sebagai berikut :
 - LKMD setiap bulan sekali pada pertemuan bulanan.
 - PKK 1 bulan 2 kali pada waktu pertemuan Kader KB PKK dan pada waktu arisan PKK.
 - RT dan RW setiap 3 bulan sekali dan bila perlu setiap ada kegiatan.

B A B III
P E N U T U P

Demikianlah laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun anggaran 1999/2000 dapat kami buat dan kami laksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada guna sebagai bahan evaluasi terhadap tugas kami selaku Kepala Desa dan sudah barang tentu laporan ini ada kekurangan lebihnya untuk saran dan pendapat selalu kami horepkan, guna meningkatkan terhadap - tugas - tugas kami selaku Kepala Desa.

